

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah penduduk di Indonesia telah masuk dalam kategori negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia, yang telah mencapai peringkat keempat. Dengan memiliki jumlah penduduk yang melimpah ini, seharusnya bisa menjadi modal yang besar untuk dapat memajukan pembangunan perekonomian nasional. Akan tetapi jumlah penduduk yang besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat permasalahan indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satunya yaitu permasalahan pada lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi akibat lapangan yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah para pencari kerja yang tersedia serta kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan timbulnya kemiskinan, ketimpangan sosial maupun ekonomi, serta masalah-masalah lainnya (Saukina Ila Salsabila et al., 2023).

Peran manusia dalam mengelola pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran mereka sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan juga konsumsi hasil pembangunan itu sendiri. Indonesia mungkin memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk berkembang. Kondisi tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, dengan banyak orang yang bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada juga orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena beberapa faktor yang tidak menunjang, seperti tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan

harapan perusahaan atau lembaga yang ada, dan di lain pihak. Namun, kurangnya lapangan kerja menyebabkan penurunan partisipasi angkatan kerja (Haspa et al., 2023).

Di era globalisasi saat ini, setiap tempat kerja harus memberikan kesempatan kerja yang sama kepada perempuan. Ini akan memastikan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan orang yang produktif. Meskipun perempuan merupakan mayoritas penduduk di seluruh belahan dunia, mereka lebih cenderung tertinggal daripada pria dalam hal memasuki pasar tenaga kerja. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya revolusi industri di seluruh negara di dunia, peran perempuan mulai efektif dalam pasar tenaga kerja. Kondisi seperti ini tidak selalu menguntungkan perempuan; seringkali, mereka dianggap sebagai tenaga kerja dengan upah rendah. Faktor rumah tangga, seperti memiliki peran ganda yang harus dilakukan oleh perempuan, seringkali membuat pekerja perempuan mengalami keterbatasan dalam melakukan pekerjaan yang produktif. Peran ini adalah mengabdikan diri kepada keluarga juga berkontribusi pada pembangunan. Keinginan perempuan untuk bekerja memerlukan keterampilan tambahan dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Menjadi perempuan dengan segala peran yang disandang bukan sebuah hal yang mudah. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dunia kerja seperti laki-laki. Penyerapan tenaga kerja sudah seharusnya dapat disesuaikan dengan peningkatan jumlah penduduk. Memanfaatkan ketersediaan tenaga kerja adalah komponen penting dalam keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Kondisi tersebut juga

dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap perempuan (Hardiani et al., 2020).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2023, ada perbedaan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenis kelamin, dengan 20.654.659 orang laki-laki dan 20.761.748 orang perempuan. Tidak serta merta perbedaan kecil dalam jumlah penduduk tersebut menjadikan perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memiliki kondisi yang sama. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebagai ukuran, TPAK akan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam situasi di mana jumlah penduduk yang bekerja juga tinggi. TPAK sendiri adalah rasio atau perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja (baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan) dengan total penduduk usia kerja. TPAK adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan usia kerja dalam kelompok yang sama. Semua orang berusia antara 15 dan 60 tahun, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, disebut angkatan kerja. Orang-orang yang tidak bekerja, seperti anak sekolah dan ibu rumah tangga, juga disebut angkatan kerja (Haspa et al., 2023). Sedangkan menurut Ariesti & Asmara (2023) Besar populasi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan atau pencarian pekerjaan, disebut tingkat partisipasi angkatan kerja.

Angka TPAK di Jawa Timur menunjukkan perbedaan yang signifikan antara gender. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2023,

partisipasi pekerja pria mencapai 85,90%, sedangkan partisipasi pekerja perempuan hanya 59,46%. Dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang terus berkembang, perempuan sekarang memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkontribusi pada pembangunan nasional. Kajian tentang bagaimana perempuan dapat masuk ke pasar tenaga kerja yang lebih luas semakin diperdebatkan. Diterimanya perempuan sebagai karyawan di berbagai industri menunjukkan bahwa tantangan yang menghalangi perempuan untuk bekerja mulai berkurang.

Untuk mencapai kesejahteraan, perempuan menghadapi dua hambatan utama yaitu kapitalisme dan patriarki. Sementara patriarki menindas perempuan dengan mempekerjakan perempuan dengan upah yang terlalu rendah dengan alasan bahwa perempuan hanyalah pendukung dan bukan pencari nafkah utama, dengan masa kerja yang lebih pendek, kapitalisme menindas perempuan karena tenaga kerja perempuan dianggap lebih murah sehingga mengurangi biaya produksi. Kondisi ini malah menambah beban yang harus dipikul oleh perempuan daripada membantu menyejahterakan mereka (Amin, 2013). Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Jawa Timur berikut grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) Jawa Timur kurun waktu 2019-2023;



Gambar 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Jawa Timur 2014-2023

Sumber: Badan Pusan Statistik Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan (TPAKP) dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Disebabkan oleh faktor-faktor berikut; Pada tahun 2014, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 53,63 persen, kemudian naik menjadi 55,56 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, TPAKP Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 53,17 persen, tetapi kembali naik menjadi 55,56 persen pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 dan 2019 TPAKP Jawa Timur mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 55 persen. Pada tahun 2020 TPAKP Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 56,56 persen yang kemudian turun lagi pada tahun 2021 sebesar 56,11 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 56,11 persen pada tahun 2021, namun TPAKP Jawa Timur kembali mengalami kenaikan menjadi 57,28 persen pada tahun 2022 dan terus naik pada tahun tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga

ingin berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terus meningkat karena lebih banyak lapangan pekerjaan yang menerima tenaga kerja perempuan dan lebih banyak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan berusaha memperbaiki taraf hidupnya.



Gambar 1. 2 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki Laki Dan Perempuan

Sumber: Badan Pusan Statistik Jawa Timur (data diolah)

Di Provinsi Jawa Timur, ada perbedaan yang signifikan dalam partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Dari tahun 2014 hingga 2023, persentase pekerja laki-laki berada di kisaran 80 persen, sedangkan persentase pekerja perempuan berada di 50 persen. Ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara tingkat partisipasi pekerja laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, terjadi pembagian antara jenis pekerjaan dalam (domestik) dan pekerjaan luar (publik). Ini menghasilkan masyarakat patriarki di mana laki-laki dan perempuan lebih banyak

mengontrol pekerjaan sektor publik daripada pekerjaan domestik. Konstruksi sosial menyebabkan pembagian yang tidak seimbang. Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan kurang mendapatkan penghargaan. Sebagai akibat dari fakta bahwa laki-laki mendominasi sektor publik, kaum perempuan percaya bahwa mereka memikul tanggung jawab yang berat di tengah-tengah sektor pekerjaan yang terbatas, khususnya di sektor domestik.

Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi seperti; ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan upah minimum sangat menentukan. Upah minimum yang ditetapkan di suatu daerah dapat mendorong atau menghambat perempuan untuk bekerja, upah yang lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Rata-rata lama sekolah juga berperan penting, pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan formal.

Selain itu, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja terkait erat. Meskipun kenaikan upah minimum mungkin meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang tidak produktif, namun permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada permintaan output yang dihasilkan (Aditiya & Wildana, 2023). Pengusaha atau pelaku industri menggunakan upah minimum sebagai standar minimum untuk menentukan gaji yang akan diberikan kepada pekerja mereka. Karena upah merupakan salah satu komponen sistem pengupahan perusahaan yang mendorong produktivitas menjadi lebih optimal, peran upah sangat penting untuk kelancaran operasional perusahaan (S. Syafira & Selvia,

2024). Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, upah adalah pengembalian yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai akibat dari menerima pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Upah ini dibayar sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, dan mencantumkan tunjangan, termasuk pekerja itu sendiri (S. Syafira & Selvia, 2024). Untuk mengetahui peningkatan upah minimum yang terjadi di Provinsi Jawa Timur kurun waktu lima tahun ke belakang yaitu tahun 2014 sampai 2023 berikut adalah grafiknya;



Gambar 1. 3 Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2014-2023

Sumber: Badan Pusan Statistik Jawa Timur (data diolah)

Dari data di atas, terlihat bahwa upah minimum Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya. Bermula dari Rp1,000,000.00, pada tahun 2014, itu meningkat menjadi Rp2,040,244.30, pada tahun 2023. Penetapan tingkat upah minimum tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pekerjanya, dan besarnya mengacu pada memenuhi kebutuhan hidup layak



(KHL). Berdasarkan data sepuluh tahun terakhir, tingkat upah minimum untuk tahun 2023 adalah Rp2,040,244.30, dengan tingkat penyerapan TPAKP tertinggi sebesar 59,46%. Hal ini selaras dengan pernyataan Maharani (2017) tingkat upah dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja. Jika tingkat upah lebih tinggi, lebih banyak masyarakat akan masuk ke pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Selama ini, salah satu masalah yang sering muncul dalam hal pengupahan adalah pemahaman dan kepentingan yang berbeda tentang upah antara pengusaha dan pekerja. Karena itu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan ini. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat berarti peningkatan upah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan barang dan jasa akan meningkat. Secara makro, ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka (Maharani, 2017). Oleh karena itu pemerintah sudah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum mengatur upah minimum di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap (Sarsi et al., 2014).

Selain faktor upah, Faktor pendidikan juga memiliki kaitan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Dengan standarisasi dunia kerja yang ada tingkat pendidikan di pandang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam menentukan upah/gaji pekerja dalam suatu perusahaan. Menurut Simanjuntak (2001: 53) dalam

Rodiah (2019) Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, waktunya semakin mahal dan cenderung digunakan untuk bekerja sebagai pengganti waktu luang. Pengaruh ini lebih besar pada wanita karena kebanyakan wanita berpendidikan tinggi masuk ke pasar kerja.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan syarat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Orang-orang akan mudah mempelajari hal-hal baru jika mereka tidak memiliki pengetahuan. Pemerintah berusaha memenuhi tuntutan dunia kerja, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dengan menerapkan pendidikan dasar dua belas tahun. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bersama dengan lamanya pendidikan, akan menghasilkan pekerjaan dan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Karena upah pekerja mencerminkan produktivitas, semakin banyak penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, semakin tinggi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak pekerjaan dan upah daripada orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Salah satu faktor penting dalam TPAK perempuan adalah pendidikan, hambatan yang dihadapi oleh perempuan, seperti diskriminasi gender dalam pendidikan, menyebabkan hambatan pendidikan dan ketimpangan sosial yang semakin jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan hak yang sama dalam bidang pendidikan, khususnya untuk perempuan (Gustiara, D. N., Budiartiningsih, R., & Indrawati, 2022). Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pendidikan perempuan di Jawa Timur berikut adalah grafik perkembangan Rata

Rata Lama Sekolah Perempuan di Jawa Timur kurun waktu lima tahun mulai tahun 2014 sampai 2023;



Gambar 1. 4 Rata rata lama Sekolah Perempuan Provinsi Jawa Timur 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (data diolah)

Jika di lihat dari grafik di atas, rata rata lama sekolah perempuan di Jawa timur terus mengalami perkembangan tiap tahunnya terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 hal ini sangat tidak sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang ada di Jawa Timur yang sempat mengalami penurunan. Ini dapat di buktikan pada tahun 2021 TPAKP Jawa timur mengalami penurunan sejumlah 56,11% sedangkan angka rata rata lama sekolah perempuan di Jawa timur mengalami kenaikan sebesar 7,88% pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sejumlah 7,30%. Sangat tidak sejalan dengan pendapat Simanjuntak dalam Ikhsan (2016) Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak kesempatan untuk bekerja dan status pekerjaan yang

diterima. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mahal waktunya.

Selain Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat mempengaruhi perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja karena ditandai melalui meningkatnya hasil produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah tambah atas barang dan jasa akan mewujudkan oleh berbagai unit dalam produksi atau sektor suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.(Wasono et al., 2020).



Gambar 1. 5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusan Statistik Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan gambar grafik di atas memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur tahun ke tahun mendapati kenaikan dari tahun 2013 sebanyak Rp 1.262.684,50 juta serta mendapati kenaikan sampai dengan tahun 2019 sebanyak Rp. 1.649.895,60 juta. Namun di tahun 2020 mendapati penurunan sebanyak Rp. 1.611.392,60 juta dan di tahun 2021 mendapati

kenaikan sebanyak Rp 1.668.754,40 juta, kemudian di tahun 2022 sampai 2023 mendapati kenaikan dengan sebanyak Rp 1.844.808,70 juta.

Hal ini memperlihatkan hingga Produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur mendapati kenaikan bersifat fluktuasi. Dengan adanya peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) ternyata gagal membuat penduduk usia kerja khususnya perempuan produktif pada perekonomian. Dengan adanya kenaikan upah bahkan tingkat tertinggi di Provinsi juga gagal dalam meningkatkan kontribusi angkatan kerja perempuan di Indonesia dan di seluruh Provinsi di Pulau Jawa. Jika negara ingin rakyatnya sejahtera dan taraf hidupnya meningkat, maka yang harus dilakukan oleh suatu negara adalah dengan melaksanakan pembangunan ekonomi (Wahyuningtias, 2019).

Berdasar uraian latar belakang yang telah dijabarkan, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) tidak lepas dari beberapa faktor pendukungnya seperti upah minimum, pendidikan, dan faktor sosial budaya yang terbagi menjadi beberapa daerah. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah faktor tersebut dapat mempengaruhi TPAK di Provinsi Jawa Timur maka penulis terdorong untuk meneliti yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang, rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Upah Minimum dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Rata rata Lama Sekolah perempuan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, disimpulkan tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Rata rata Lama Sekolah perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan sebagai variabel terikat upah minimum, rata-rata lama sekolah perempuan, dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel bebas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder yaitu data panel provinsi Jawa Timur dari tahun 2014–2023 digunakan. Data sekunder digunakan melalui publikasi Badan Pusat Statistik.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap manfaat penelitian yang dilakukan untuk pihak yang dituju antara lain:

1. Kepada pemerintah, penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi kementerian ketenagakerjaan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.
2. Kepada akademisi, penelitian ini dapat menambah pembendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.